

Analisis Faktor Pendorong Kecurangan Berbasis Teori Diamond Fraud pada Pemerintah Desa

Lely Kumalawati^{a,*}, and Trisna Ayu Oktavia^b

^a*Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, lely@pnm.ac.id, Indonesia*

^b*Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, tisnaoktavia@pnm.ac.id, Indonesia*

Abstract. The purpose of this study is to describe the perceptions of village government officials regarding the factors driving diamond fraud based fraud. Diamond fraud theory explains the factors of someone committing fraud. The methodology of this research is qualitative, the data used are primary data that is questionnaire. The sample in this study used a purposive sampling method with criteria of 256 employees of the Lumajang district government. The results showed that the perception of village government officials about the factors driving fraud was quite good, with mode 4 which means agreeing with the proxy of the diamond fraud theory.

Keywords: fraud, village governance, diamond fraud

*Corresponding author. E-mail: lely@pnm.ac.id

Pendahuluan

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dampak positif dari otonomi daerah ini adalah desa menjadi mandiri, sedangkan dampak negatifnya adalah rentan terjadinya kecurangan. Tindak penyimpangan pada pemerintahan tidak hanya terjadi di pemerintah pusat. Fakta yang terjadi juga pada pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, bahkan pemerintah desa, yang juga melakukan tindak penyimpangan.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* dan dikenal sebagai istilah “*Fraud Tree*” yaitu penyimpangan atas aset (*asset misapporation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*). Melihat fenomena yang sering terjadi dalam sektor pemerintahan, klasifikasi yang sering terjadi adalah korupsi, yakni sebanyak 67% dan hal ini paling merugikan negara (ACFE, 2019), memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark up* (Chandra dan Ikhsan, 2015). Korupsi yang berartikan tindakan yang merugikan kepentingan umum demi kepentingan pribadi/golongan tertentu (Karyono, 2013:22).

Organisasi independen yang mengawasi adanya tindak penyimpangan di pemerintahan adalah *Indonesia Corruption Watch* (ICW). ICW pada tahun 2017 mencatat kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode 2007-2016 yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 53 kasus pada pemerintah provinsi, dan 91 kasus pada pemerintah kabupaten/kota, dan, sebanyak 26 pada pemerintah desa (ICW, 2019). Ihsanudin (2019) menyatakan pemerintah desa di Indonesia pada tahun 2018 kasus korupsinya meningkat, sebanyak 13,61% dari seluruh level pemerintahan. Negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 40,6M atas perbuatan perangkat desa di tahun 2018. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah tersebut, termasuk juga salah satunya ada di Kabupaten Lumajang.

Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Lumajang mendorong peneliti untuk melakukan studi ini. Fenomena kasus korupsi yang terjadi di

Kabupaten Lumajang memotivasi peneliti untuk mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya tindak kecurangan berbasis *diamond fraud*. Teori *diamond fraud* menjelaskan bahwa faktor pendorong terjadinya kecurangan terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi aparatur pemerintah desa mengenai faktor pendorong kecurangan berbasis *diamond fraud*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang dilakukan di pemerintah desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan mendeskripsikan perspektif aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Lumajang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah desa di Kabupaten Lumajang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dilakukan metode purposive sampling dengan kriteria: desa yang pernah tercatat kasus kecurangan, jika dalam satu kecamatan tidak terdapat desa yang memiliki kasus kecurangan maka diwakili oleh satu desa secara acak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari intansi pemerintah desa yang diperoleh secara langsung dari responden masing-masing pemerintah desa yang sudah ditentukan sesuai dengan karakteristik pemilihan sampel. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer berupa kuesioner.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei melalui kuesioner. Kuesioner yang digunakan menggunakan skala likert dengan skor 1-5. skala likert merupakan metode mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014:152). Penilaian dalam kuesioner disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Tabel Pengukuran Skala Likert

No	Kategori Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Objek Penelitian

Pemerintah Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan, 7 Kelurahan, dan 198 Desa yang tersebar pada 1791 km² (BPS, 2019). Kabupaten Lumajang merupakan kabupaten yang potensi sumber daya alamnya besar, sehingga dapat membantu pendapatan asli daerah. Objek penelitian ini adalah pemerintah desa yang tersebar di Kabupaten Lumajang. Populasi yang terdiri dari 205 desa Kabupaten Lumajang dengan jumlah perangkat pemerintah desa sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 sebanyak 1640. Adapun sample penelitian ini terdiri dari 116 desa yang sudah memenuhi kriteria pengambilan sampel.

Responden dari masing-masing pemerintah desa yang menjadi sample penelitian adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur pemerintahan, dan kaur perekonomian sehingga responden dalam penelitian ini berjumlah 286 perangkat desa. Data penelitian ini diperoleh melalui sebaran kuesioner yang dibagikan kepada responden, sehingga memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Prosentase (%)
Kuesioner yang disebar	286	100
Kuesioner yang kembali	266	93
Kuesioner yang diolah	256	89,5
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	10	7

Sumber: data diolah, 2019.

Distribusi frekuensi 256 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin mayoritas laki-laki yakni sebesar 72,6%. Responden penelitian ini mayoritas memiliki masa kerja 0-10 tahun yakni sebesar 49%, sedangkan 11-20 tahun sebesar 31,6% dan 21-30 tahun 19,1%.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Deskripsi variabel merupakan prosedur gambaran atau ringkasan data jawaban responden secara ilmiah dalam bentuk tabel yang bertujuan untuk mendukung hasil analisis data. Cara yang dilakukan adalah melalui distribusi frekuensi dimasing-masing indikator variabel penelitian. Adapun hasil distribusi frekuensi responden ialah:

Tabel 3

Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kesesuaian Kompensasi

Item	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%	Total	Modus
X1.1	41	16,0%	184	71,9%	22	8,6%	9	3,5%	0	0,0%	256	4
X1.2	48	18,8%	175	68,4%	24	9,4%	9	3,5%	0	0,0%	256	4
X1.3	40	15,6%	161	62,9%	37	14,5%	18	7,0%	0	0,0%	256	4
X1.4	52	20,3%	158	61,7%	37	14,5%	9	3,5%	0	0,0%	256	4
X1.5	54	21,1%	172	67,2%	25	9,8%	5	2,0%	0	0,0%	256	4
X1.6	25	9,8%	187	73,0%	35	13,7%	9	3,5%	0	0,0%	256	4

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 3 menjelaskan mengenai penilaian jawaban responden atas indikator kesesuaian kompensasi (X1) yang terdiri atas 1) kompensasi keuangan (X1.1), 2) pengakuan instansi atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan (X1.2), 3) promosi (X1.3), 4) penyelesaian tugas (X1.4), 5) pencapaian sasaran (X1.5), 6) pengembangan pribadi (X1.6). Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa persepsi pegawai pemerintah desa kabupaten lumajang terhadap persepsi kompensasi keuangan (71.9%), pengakuan instansi atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan (68.4%), promosi (62.9%), penyelesaian tugas (61.7%), pencapaian sasaran (67.2%), pengembangan pribadi (73%) sebagian besar memberikan pernyataan setuju. Hal ini terlihat dari masing-masing prosentase jawaban responden dengan indikator pengembangan pribadi memiliki nilai paling tinggi. Berarti pegawai pemerintah desa Kabupaten Lumajang merasa diberikan kesempatan untuk memaksimalkan kemampuan dan pengetahuan yang dapat berdampak pada kesesuaian kompensasi yang diterima.

Tabel 4

Frekuensi Jawaban Responden Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Item	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%	Total	Modus
X2.1	65	25,4	173	67,58	12	4,7	3	1,2	3	1,2	256	4
X2.2	42	16,4	144	56,25	52	20	18	7	0	0	256	4
X2.3	50	19,5	157	61,33	46	18	3	1,2	0	0	256	4
X2.4	50	19,5	152	59,38	43	17	11	4,3	0	0	256	4
X2.5	47	18,4	128	50	58	23	23	9	0	0	256	4

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 4 menjelaskan mengenai penilaian jawaban responden atas indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) terdiri atas : 1) lingkungan pengendalian (X2.1), 2) penilaian resiko (X2.2), 3) kegiatan pengendalian (X2.3), 4) informasi dan komunikasi (X2.4), dan 5) pemantauan pengendalian intern (X2.5). Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa persepsi

pegawai pemerintah desa kabupaten lumajang terhadap persepsi sistem pengendalian intern pemerintah sudah baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang sebagian besar memberikan persepsi setuju pada indikator lingkungan pengendalian (67.58%), penilaian resiko (56,25%), kegiatan pengendalian (61.3%), informasi dan komunikasi (59.37%), pemantauan pengendalian intern (50%). Nilai tertinggi dari masing-masing indikator adalah lingkungan pengendalian yang berarti bahwa responden memberikan persepsi pada pemerintah desa setempat telah ada pembagian wewenang dan tanggungjawab.

Tabel 5
Frekuensi Jawaban Responden Variabel Budaya Organisasi

Item	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%	Total	Modus
X3.1	47	18,36	150	58,59	45	17,58	14	5,47	0	0,00	256	4
X3.2	63	24,61	159	62,11	21	8,20	9	3,52	4	1,56	256	4
X3.3	23	8,98	172	67,19	52	20,31	5	1,95	4	1,56	256	4
X3.4	42	16,41	129	50,39	41	16,02	40	15,63	4	1,56	256	4
X3.5	34	13,28	128	50,00	51	19,92	26	10,16	17	6,64	256	4

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 5 menjelaskan mengenai penilaian jawaban responden atas indikator Budaya Organisasi (X3) sebagai berikut: 1) model peran yang visible, 2) komunikasi harapan-harapan etis, 3) pelatihan etis, 4) hukuman bagi tindakan tidak etis, dan 5) mekanisme perlindungan etika. Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa persepsi pegawai pemerintah desa Kabupaten Lumajang terhadap persepsi budaya organisasi pemerintah desa setempat tidak baik dikarenakan pernyataan yang terdapat pada kuesioner merupakan budaya organisasi yang buruk. Sekalipun jawaban responden yang tertinggi adalah setuju pada indikator pelatihan etis sebesar 67% dibandingkan jawaban indikator lainnya, namun jawaban responden merata hingga jawaban sangat tidak setuju pada indikator kelima yakni mekanisme perlindungan etika sebesar 17%.

Tabel 6
Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kompetensi

Item	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%	Total	Modus
X4.1	0	0,00	25	9,77	30	11,72	102	39,84	99	38,67	256	2
X4.2	0	0,00	13	5,08	48	18,75	108	42,19	87	33,98	256	2
X4.3	0	0,00	0	0,00	62	24,22	107	41,80	87	33,98	256	2
X4.4	0	0,00	12	4,69	74	28,91	82	32,03	88	34,38	256	1
X4.5	0	0,00	6	2,34	80	31,25	101	39,45	69	26,95	256	2
X4.6	0	0,00	0	0,00	57	22,27	100	39,06	99	38,67	256	2
X4.7	0	0,00	14	5,47	49	19,14	83	32,42	110	42,97	256	1

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 6 menjelaskan mengenai penilaian jawaban responden atas indikator kompetensi (X4) terdiri atas: 1) pemahaman terhadap cara kerja, prosedur kerja, proses kerja, 2) pemahaman terhadap rencana dan target kerja, 3) pemahaman

proses kerja pada bagian lain, 4) pemahaman/kemampuan tentang situasi dan permasalahan organisasi, 5) kemampuan penyesuaian diri, pengendalian diri dan bekerja sama, 6) kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan pokok pikiran, 7) penguasaan terhadap peralatan dan teknologi informasi. Tabel 6 menunjukkan hasil bahwa persepsi pegawai pemerintah desa kabupaten lumajang terhadap persepsi kompetensi sudah baik, hal ini ditunjukkan hasil bahwa persepsi responden mengenai pemahaman terhadap rencana dan target kerja yang tidak setuju sebesar 108%. Bahkan untuk persepsi pemahaman tentang situasi dan permasalahan organisasi dan penguasaan terhadap teknologi informasi buruk, yakni dominan sangat tidak setuju.

Tabel 7
Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kecurangan (*Fraud*)

Item	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%	Total	Modus
Y1.1	0	0,0%	34	13,3%	63	24,6%	98	38,3%	61	23,8%	256	2
Y1.2	0	0,0%	20	7,8%	71	27,7%	105	41,0%	60	23,4%	256	2
Y1.3	0	0,0%	30	11,7%	59	23,0%	100	39,1%	67	26,2%	256	2

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 7 menjelaskan mengenai penilaian jawaban responden atas indikator kecurangan (Y1) terdiri atas: 1) penyimpangan atas asset (*asset misappropriations*), 2) pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*), dan 3) korupsi (*corruption*). Tabel 7 menunjukkan hasil bahwa persepsi pegawai pemerintah desa kabupaten lumajang terhadap persepsi kecurangan (*fraud*) sudah baik. Hal ini ditunjukkan hasil bahwa jawaban responden sebagian besar tidak setuju terhadap 1) penyimpangan atas asset (*asset misappropriations*) sebesar 38%, 2) pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*) sebesar 41%, dan 3) korupsi (*corruption*) 39%. Namun jawaban responden mengenai persepsi kecurangan tersebar merata hingga jawaban setuju. Meskipun sebagian besar jawaban responden tidak setuju atas persepsi kecurangan namun masih terdapat responden yang memberikan persepsi setuju, dan nilainya beda tipis.

Frekuensi jawaban responden untuk variabel kompensasi menggambarkan bahwa kompensasi yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap para pegawai sudah memuaskan dan dapat mencegah adanya tindak kecurangan. Kompensasi berperan penting dalam menggerakkan pegawai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan berperan penting dalam meminimalisasi tekanan yang dirasakan oleh pegawai pemerintah desa, sehingga kecenderungan kecurangan dapat dicegah. Sejalan dengan *diamond fraud*, jika seseorang memiliki kebutuhan finansial maka tekanan akan muncul dan cenderung melakukan kecurangan

untuk memenuhi kebutuhannya, tekanan yang diawali dengan seseorang merasa tidak puas dengan kompensasi yang dia peroleh (Cressey, 1953 dan Wolfe, 2004).

Frekuensi jawaban responden untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah menunjukkan bahwa persepsi tentang sistem pengendalian intern pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Lumajang sudah baik, sehingga dapat mencegah adanya tindak kecurangan yang terjadi pada pemerintah desa. SPIP berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat melindungi pemerintah desa dari adanya kelemahan sumber daya manusia yang dimiliki sehingga terhindar dari kecenderungan kecurangan. Sejalan dengan teori *diamond fraud*, bahwa dengan adanya kesempatan yang memungkinkan pegawai untuk melakukan kecurangan dengan cara menggunakan kelemahan dari pengendalian intern yang ada (Cressey, 1953 dan Wolfe, 2004).

Frekuensi jawaban responden untuk variabel budaya organisasi menunjukkan bahwa budaya organisasi yang terdapat pada pemerintah desa di Kabupaten Lumajang dapat mendorong terjadinya kecurangan. Budaya organisasi yang melekat pada pemerintah desa Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil penelitian merupakan budaya organisasi yang buruk, dan mereka memahami apa yang sudah berjalan selama ini merupakan hal yang sudah terjadi sejak masa kepemimpinan terdahulu dan sebagaimana mestinya. Budaya organisasi yang melekat pada pemerintahan desa seperti perilaku atasan yang kurang baik menjadi panutan dan sanksi atas perilaku tidak etis diabaikan. Sejalan dengan teori *diamond fraud*, jika seseorang cenderung melakukan kecurangan karena merasa apa yang dilakukan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan, hal ini menjadi pembenaran pelaku dalam melakukan tindak kecurangan (Cressey, 1953 dan Wolfe, 2004).

Frekuensi jawaban responden untuk variabel kompetensi menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang terdapat pada pemerintah desa Kabupaten Lumajang masih tergolong rendah, sehingga tindak kecurangan akan dapat dicegah, namun begitu sebaliknya jika kompetensi yang dimiliki sudah bagus, maka akan cenderung adanya tindak kecurangan. Aparatur pemerintah desa tidak memahami tanggungjawab masing-masing jabatan dan kurang mampu dalam memahami proses kerja berbasis teknologi, sehingga berdampak pada kurangnya memaksimalkan tujuan pemerintah desa setempat. Kompetensi sumber daya manusia yang terdapat pada pemerintah desa Kabupaten Lumajang sangat rendah, ini dikarenakan sebagian besar aparatur pemerintah desa di Kabupaten Lumajang memiliki pendidikan terakhir SMA

Sejalan dengan teori *diamond fraud*, jika seseorang cenderung melakukan kecurangan maka dia memiliki kompetensi untuk memainkan peluang dan rasionalisasi yang ada (Cressey, 1953 dan Wolfe, 2004).

Frekuensi jawaban responden untuk variabel kecurangan (*fraud*) menunjukkan bahwa perilaku tidak etis pegawai pemerintah desa tidak terjadi, ini digambarkan dengan persepsi perilaku tidak etis yang tidak setuju, begitupun dengan persepsi kecurangan. Artinya, perilaku tidak etis pegawai akan mendorong munculnya tindak kecurangan pada pemerintah desa, atau sebaliknya. Perilaku merupakan sesuatu hal yang sukar dimengerti oleh orang lain, hanya dirinya sendiri dan interaksi yang memahami maksudnya. Sejalan dengan teori atribusi (Atkinson, 1974) yang mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu, atribut menyebabkan perilaku.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang persepsi aparatur pemerintah desa tentang kecurangan berbasis *diamond fraud*, elemen tekanan di proxykan dengan kepuasan kompensasi, elemen peluang di proxykan dengan sistem pengendalian intern pemerintah, elemen rasionalisasi di proxykan budaya organisasi dan elemen kemampuan di proxykan dengan kompetensi. Secara keseluruhan aparatur pemerintah desa kabupaten lumajang memberikan persepsi yang cukup bagus mengenai faktor kecurangan. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah menguji adanya pengaruh kecurangan berbasis *diamond fraud* atas persepsi aparatur pemerintah desa, sehingga dapat menyimpulkan faktor apa saja yang menonjol dalam memengaruhi kecurangan.

Daftar Pustaka

- Adelin, Vani. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Bumn Di Kota Padang). Universitas Negeri Padang.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia, 2019. Survei Fraud Indonesia. Jakarta : <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Atkinson, J.W. dan Raynor J.O. 1974. *Motivation and Achievement*. New York: Wiley.
- Badan Pusat Statistik, 2019. Daftar Nama Desa. Lumajang: <https://lumajangkab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab5>
- Bestari, D. S. 2016. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. JOM Fekon (3): 1436-1447.

- Buckley, M. R., D. S. Wiese M. G. and Harvey, 1998. An Investigation Into Dimensions of Unethical Behavior. *Journal of Education for Bussiness* 73 (5): 284-290.
- Chandra D. P. dan Ikhsan S. 2015. Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (fraud) pada Dinas Pemerintah Se Kabupaten Grobogan. *Accounting Analysis Journal* 4(3):1-9.
- Cressey, Donald R. 1953. *Other People's Money*. Paterson Smith. Montclair.
- Ghozali, Imam. 2008. *Struktural Equation Modeling*. Edisi Dua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikhsanudin, 2019. ICW: 158 Perangkat Desa Terkena Kasus Korupsi. Jakarta : Detik News. <https://news.detik.com/berita/4528256/icw-158-perangkat-desa-terkena-kasus-korupsi>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2010-2014. Jumlah Kasus Korupsi. ICW, Jakarta.
- Indonesia Corruption Watch, 2019. Laporan Akhir Tahun ICW 2018. <https://antikorupsi.org/id/articles/annual-reports>
- Institute of Internal Auditor (IIA) <https://iia-indonesia.org/>.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kurrohman, Lailiyah, Wahyuni. 2017. Determinant of Fraudulent in Government: An Analysis in Situbondo Regency, East Java, Indonesia. *Journal of Economics and Management* 11 (S1). 133 – 140.
- Kusumastuti, N. Ratri. Dan W. Meiranto. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting* (1): 1-15.
- Mustikasari, Dhermawati Putri. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*. 2(3)
- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal* 2 (3): 259-267.
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Shintadevi, P. Farizqa. 2015. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal (IV)* : 111-126.
- Stuart, Iris C. 1950. *Auditing and Assurance Service: An Applied Approach*. Boston: Irwin McGraw-Hill.
- Tang, T. L. P. dan Randy K. Chiu. 2003. Income, Money Etic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? *Journal of Business Ethics* 46: 13-30.
- Thoyibatun, Siti. 2009. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. *Ekonomi dan Keuangan*. 16(02): 245-260..
- Tuanakotta, Theodorus M. 2014. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha di Indonesia. *The Indonesia Journal of Accounting Research (IJAR)*. 9 (3): 21-69.
- Wolfe, David T dan Dana R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal (management fraud)*: 38-42.
- Zulkarnain, R. Mirza. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal* 2 (2): 125-130.
- wardi. (2016, Februari 11). *Data Panel Teori Dasar dan Aplikasi di Stata*. Retrieved April 2017, 2, from *Academia*: https://www.academia.edu/7967973/DATA_PANEL_TEORI_DASAR_DAN_APLIKASI_DI_STATA_Oleh_Akbar_Suwardi.